

<b>SILABUS/SAP</b>	Tgl. Berlaku : Mei 2012	Versi/Revisi : 01/00
	Tgl. Revisi : -	Kode Dok.: FRM-01

## **SILABUS, SAP MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAHAN 3 SKS**

### **Deskripsi dan tujuan mata kuliah**

Perkuliahan Manajemen Keuangan Pemerintahan membahas mulai dari perencanaan keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengendalian keuangan negara. Pada awalnya akan dibahas berbagai pengertian pengelolaan keuangan pada umumnya, dan pengertian serta lingkup sektor, pengertian barang dan jasa.

Selanjutnya perkuliahan dilanjutkan dengan pembahasan materi tentang pokok-pokok manajemen keuangan pemerintahan dan diteruskan dengan pembahasan mengenai dasar-dasar hukum (berbagai landasan formal) pengelolaan keuangan negara, perencanaan keuangan Negara jangka pendek dan jangka panjang, struktur pemerintahan Pusat dan daerah, proses penganggaran APBN/D dan APBN/D Perubahan, mekanisme-mekanisme pokok dalam pelaksanaan APBN/D serta pelaporan, pengelolaan hutang negara dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara.

Belahan kedua semester ini diisi dengan pembahasan tentang struktur pemerintahan daerah, prinsip-prinsip dan mekanisme pengelolaan keuangan oleh pemerintahan Daerah (kabupaten dan kota), pengelolaan kas dan asset daerah, penganggaran dan pengukuran kinerja sektor publik, pengelolaan keuangan negara dan otorisasi legislatif

Keseluruhan materi kuliah akan diselesaikan dalam empat belas kali pertemuan (tidak kurang) tatap muka diluar tugas-tugas yang terstruktur dengan perkuliahan serta diadakan dua kali evaluasi yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

### **Metodologi pengajaran**

perkuliahan bertumpu pada aktivitas dan partisipasi mahasiswa, diskusi berkelompok Terpimpin (LED Group Discussion). Kuliah tidak saja menyangkat pengemukaan hal-hal pokok yang berhubungan dengan topic tiap pertemuan, melainkan mahasiswa diwajibkan untuk secara berkelompok menyajikan makalah-makalah kecil untuk menjadi bahan bahasan

### **Kehadiran**

Peserta didik diharapkan selalu menghadiri perkuliahan dan diwajibkan untuk hadir minimal 75% atau 11 kali dari 14 kali pertemuan. Apabila peserta didik kehadirannya kurang dari 75% (11 pertemuan) maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

### **Bahan Bacaan**

#### **Buku Wajib**

1. Fred Weston, dan E Copeland, Essentials Of Managerial finance, last Edition
2. Deddi Nordiawan, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat.
3. Sonny Yuwono, Tengku Agus Indra Jaya, Hariyandi, Penganggaran Sektor Publik, 2005, Bayu Media Publishing
4. M. Suparmoko, Ekonomi Publik, Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, 2002, Penerbit Andi Yogyakarta
5. Tulis L. Meliala, Niko Silitonga, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Smesta Media
6. UU RI No tentang APBN dan APBNP 2012

Program Studi Magister Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

7. UU RI No 15/2004 tentang pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
8. UU RI No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NASIONAL
9. UU ri No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10. PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota
11. PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
12. PP No 38/2008 tentang perubahan atas PP No 6/2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara Daerah

**Buku Anjuran**

1. Permendagri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara K. Bertens (2000) Pengantar Etika Bisnis, Penerbit Kanisius Yogyakarta.
2. Permendagri No 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Permendagri No 32/2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 (diperbaharui bila sudah ada yang terbit baru)
4. Peraturan Menteri Keuangan di bidang pengelolaan keuangan Negara

**Evaluasi Hasil Belajar**

- partisipasi dalam kelas 15%,
  - tugas-tugas tertulis /kuis 15%,
  - UTS 25 % dan
  - UAS 45%
- (dengan catatan materi UAS mencakup seluruh materi perkuliahan dari awal sampai akhir (bukan hanya materi perkuliahan sesudah UTS saja))

**Jadwal Pertemuan**

Perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS dengan durasi waktu 50 menit/SKS.




No	Pokok Bahasan	Sub. Pokok Bahasan	Daftar Pustaka
1	Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overview tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan</li> <li>2. Pengertian sektor publik dan sektor swasta.</li> <li>3. Pertimbangan-pertimbangan perlunya perkuliahan manajemen keuangan sektor publik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fred Weston dan E Copeland</li> <li>• Deddi Nordiawan, bab 1</li> <li>• Sony Yuwono, bab 1</li> </ul>
2	Struktur pemerintahan pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur pemerintahan Pusat</li> <li>2. System desentralisasi dan otonomi daerah</li> <li>3. Peran eksekutif dan legislative dalam pengelolaan keuangan Negara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deddi Nordiawan, bab 3</li> <li>• Sony Yuwono,</li> <li>• PP 38/2007</li> </ul>
3	Dasar-dasar hukum keuangan negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hierarchi perundang-undangan.</li> <li>2. Pengertian Keuangan Negara</li> <li>3. Pengelolaan keuangan Negara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP NO 38/2007</li> <li>• UU APBN/APBNP</li> <li>• PP No 33/2004</li> <li>• PP No 15/2004</li> </ul>
4	Perencanaan Pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses penyusunan rencana pembangunan nasional</li> <li>2. Proses penetapan rencana pembangunan nasional</li> <li>3. Proses pematkhiran rencana pembangunan nasional</li> <li>4. Artikulasi rencana pembangunan nasional</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 25/ 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> </ul>

Program Studi Magister Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

		terhadap penganggaran/APBN	
5	Penyusunan Penganggaran Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalender penganggaran</li> <li>2. Penetapan asumsi-asumsi dasar</li> <li>3. Penetapan program-program</li> <li>4. Proyeksi keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU APBN/P</li> <li>• Permendagri no 13/2006</li> <li>• Permendagri 32/2008</li> <li>• UU No 15/2004</li> <li>• Tulis S. Meliala</li> </ul>
6	Pelaksanaan APBN/P	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses belanja barang dan jasa</li> <li>2. Proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin</li> <li>3. Proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan (APBN/P)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU APBN/P</li> <li>• Permendagri no 13/2006</li> <li>• Permendagri 32/2008</li> <li>• UU No 15/2004</li> </ul>
7	Pertanggung Jawaban Keuangan dan otoritas legislatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme perbendaharaan Negara</li> <li>2. Pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran kementerian</li> <li>3. Pertanggung jawaban</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU APBN/P</li> <li>• Tulis S. Meliala</li> </ul>
<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>			
8	Penerbitan sekuritas publik dan Pengelolaan Utang Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga-lembaga keuangan</li> <li>2. Penerbitan sekuritas publik</li> <li>3. Pengelolaan hutang negara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU no 8/1995</li> <li>• Kebijakan dan mekanisme penerbitan sekuritas publik</li> <li>• Peraturan menkeu tentang pengelolaan hutang Negara</li> </ul>
9	Struktur pemerintahan daerah dan penganggaran (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur pemerintahan dan unit-unit pemerintah daerah</li> <li>2. Penyusunan rencana pembangunan daerah dan Siklus penganggaran</li> <li>3. Peran eksekutif dan legislative dalam pengelolaan keuangan negara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 33/2004</li> <li>• PP No 15/2004</li> <li>• PP No 38/2007</li> <li>• Perda-perda tentang struktur pemerintahan daerah dan penganggaran</li> <li>• Perda No 17/2007</li> <li>• PP No 41/2007</li> </ul>
10	Prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan pendapatan, penerimaan, pengeluaran uang</li> <li>2. Pokok-pokok perbendaharaan daerah</li> <li>3. Pengelolaan deficit anggaran</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 15/2004</li> <li>• Perda-perda tentang struktur pemerintahan daerah dan penganggaran</li> <li>• Perda No 17/2007</li> </ul>
11	Manajemen asset daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganggaran pembangunan daerah</li> <li>2. Pengelolaan asset milik daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP no 38/2008</li> </ul>
12	Pertanggung jawaban keuangan daerah dan otoritas legislatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme perbendaharaan daerah</li> <li>2. Pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran unit kelengkapan pemerintah daerah</li> <li>3. Pertanggung jawaban dalam proses legislasi di daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 15/2004</li> <li>• Perda-perda tentang struktur pemerintahan daerah dan penganggaran</li> <li>• Perda No 17/2007</li> <li>• PP 41/2007</li> </ul>
13	Anggaran dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganggagan Sektor Publik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sony Yuwono</li> </ul>

Program Studi Magister Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

	pengukuran kinerja sektor publik	2. Pengukuran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 15/2004</li> </ul>
14	Pengelolaan kas sektor publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komitmen penerimaan dan pengeluaran kas</li> <li>Mekanisme pengamanan pemasukan dan pengeluaran kas.</li> <li>Kebijakan pengelolaan kas.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sony Yuwono</li> <li>UU No 15/2004</li> <li>Artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang relevant</li> </ul>
<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>			

Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disusun oleh :	
Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Program Magister Akuntansi	Koordinator Tim	Dosen Pembina
			
Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak	Prof. Dr. H. Karhi N Sardjudin, M.M., Ak.	Prof. Dr. H. Karhi N Sardjudin, M.M., Ak.	I Nengah Seroma, drs., M.M., Ak.